



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2023 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA

☎ 0761 - 23369

📷 disporariau

🌐 www.dispora.riau.go.id



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor ⁹⁵... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor ²⁵...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 September 2022

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 September 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S.F. HARIYANTO
BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR 38





PROVINSI RIAU

1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja PD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

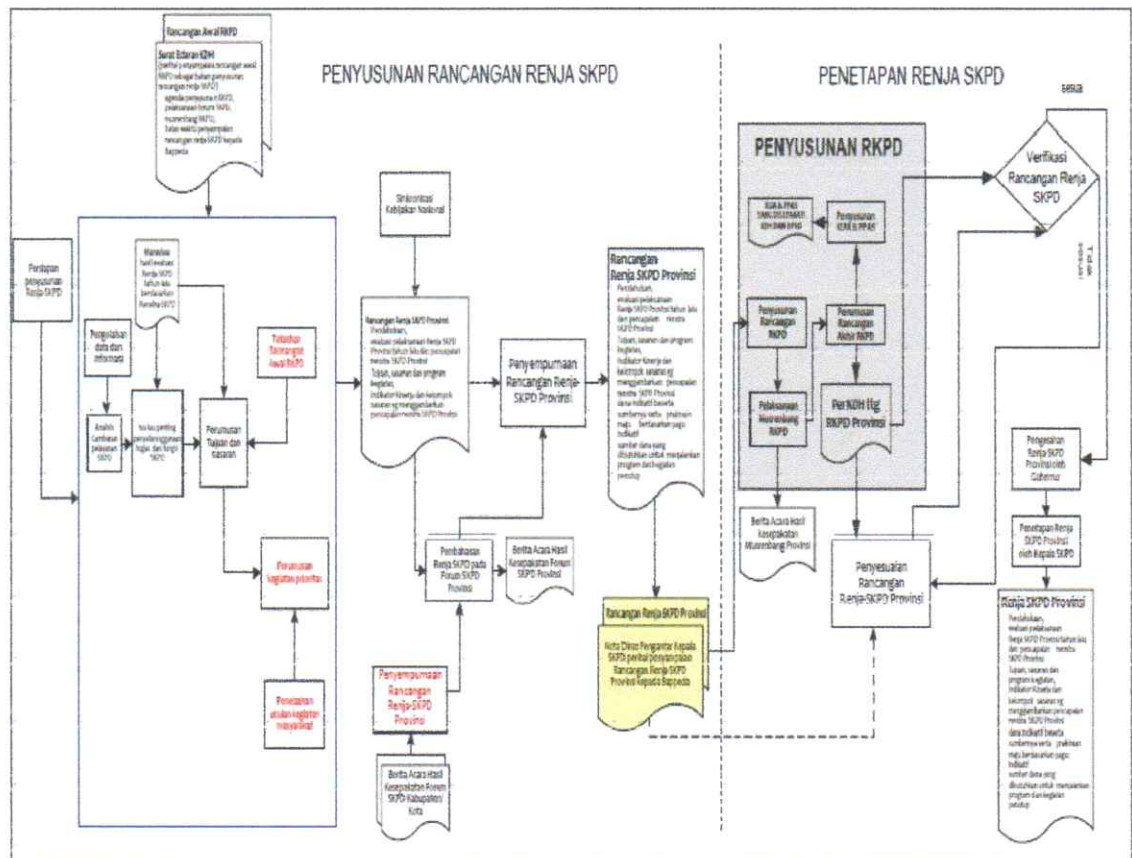
Dari Gambar 1.1, proses penyusunan Renja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

Persiapan Penyusunan Renja meliputi : (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat

Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Gambar 1.1. Diagram Proses Penyusunan Renja



2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat

Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDALITBANG Provinsi Riau dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

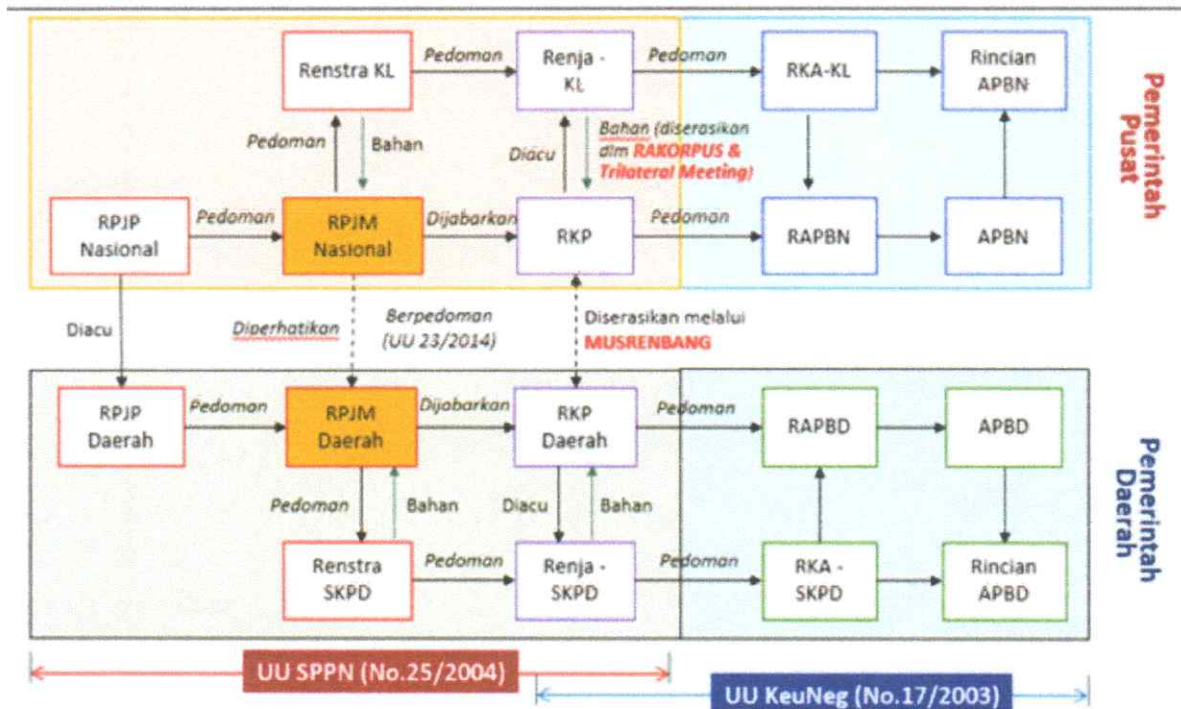
Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra perangkat daerah, dengan Renja K/L serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD dapat dilihat pada diagram berikut :

Gambar 1.2. Diagram Keterkaitan Dokumen



Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dari Rancangan Awal Renja sampai Rancangan Akhir Renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, rancangan awal RKPD, dan RKPD.

Pada penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan berpedoman pada :

1. Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan Awal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappedalitbang Provinsi Riau untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 ini memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646)
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322)
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40)
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 11)
 20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12)
 21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3)

22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7)
23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Secara Online Provinsi Riau.
24. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 30)
25. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2023 yaitu untuk memberikan arah dan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan periode 1 (satu) tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2019-2024

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Riau Tahun 2023 ini adalah untuk :

- a. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2023.

- c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan laporan kinerja

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2023 terdiri atas 5 (*lima*) bab.

Bab I : Pendahuluan; memuat uraian terkait latar belakang, landasan hukum, Maksud dan Tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021; memuat uraian terkait evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; memuat uraian terkait telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah; serta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; memuat uraian terkait program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bab V : Penutup; memuat hal-hal terkait catatan penting pelaksanaan, kaedah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut.



PROVINSI RIAU

2

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian indikator kinerja meliputi *Input*, *Output* dan *Outcome*, antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*).

Berikut evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana pada Tabel 2.1 yang diambil dari Tabel T-C.29.

Tabel. 2.1. (TC.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

KODEFIKASI	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)*100
2 19 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran			100 %	100 %	100%	100		
2 19 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN			100 %	100 %	100%	100 %		
2.19.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			20 Jenis	14 Jenis	70%	15 Jenis		
2.19.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			17 Unit	17 Unit	100%	16 Unit		
2.19.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan			7649 porsi	4684 porsi	61%	7649 Porsi		
2.19.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan			30 Jenis	30 Jenis	100%	30 Jenis		
2.19.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			135 kali	133 kali	99%	258 Kali		
2 19 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat ASN			100 %	100 %	100%	100 %		
2.19.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan			5 Unit	5 Unit	100%	6 Unit		
2 19 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan administrasi Perkantoran			100 %	100 %	100%	100 %		
2.19.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim			200 Surat	200 Surat	100%	200 Surat		

KODEFIKASI	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	(Renstra Perangkat daerah) Tahun 2019 s/d 2024	Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)*100
2.19.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar			21 Rekening	21 Rekening	100%	21 Rekening	10	
2.19.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rentang waktu pelayanan kantor yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		
2 19 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100 %	100 %	100%	100 %		
2.19.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara			10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit		
2.19.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit		
2.19.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			70 Unit	70 Unit	100%	70 Unit		
2.19.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara			10 ruang	10 ruang	100%	10 Unit		
2 19 02	Program Pengembangan kapasitas daya salng kepemudaan	Jumlah Pemuda Kader			150 Orang	201 Orang	134%	728 Orang		
2 19 02 1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Yang siap Berperan aktif dalam Pembangunan			25 Orang	15 Orang	60%	26 Orang 728 Orang		
2.19.02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing PemudaPelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Yang terseleksi menjadi pemuda pelopor tingkat daerah			25 Orang	15 Orang	60%			

KODEFIKASI	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	(Renstra Perangkat daerah) Tahun 2019 s/d 2024	Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)*100
2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing WirausahaMuda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda yang mengikuti pembinaan dan pengembangan wirausaha			205 Orang	201 Orang	98%			
2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah pemuda yang mengikuti TOT dan penyuluhan bahaya narkoba yang akan menjadi kader penyuluh bahaya narkoba dan HIV/AIDS			400 Orang	185 Orang	46%			
2.19.02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera tingkat provinsi dan nasional			38 Orang	38 Orang	100%			
2.19.02.1.01.05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan SaranaKepemudaan Provinsi	Jumlah sarana prasarana kepemudaan yang terpelihara			1 Unit	1 Unit	100%			
2.19.02.1.01.06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada pemuda dan organisasi pemuda yang berprestasi tingkat provinsi			20 penghargaan	15 penghargaan	75%			
2.19.02.1.01.09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Berorganisasi			0 Orang	0 Orang	0%			
2 19 02 1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemuda Kader dan wirausaha muda yang mandiri dan berdaya saing								
2.19.02.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina			1 Organisasi	1 Organisasi	100%			
2 19 03	Program Pengembangan daya saing Keolahragaaan	Jumlah atlet dan cabang olahraga yang berprestasi			15 Cabor/ 85 Orang	4 Cabor/ 35 Orang	26,67 41,18			

KODEFIKASI	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	(Renstra Perangkat daerah) Tahun 2019 s/d 2024	Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11={10/4}*100
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi			13 Cabang Olahraga	13 Cabang Olahraga	100%			
2.19.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Yang Dikelola dan dipelihara			14 Unit	14 Unit	100%			
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multieven dan Single Even Tingkat Provinsi Yang Terselenggara			20 Kejuaraan	20 Kejuaraan	100%			
2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah ajang kompetisi cabang olahraga yang diikuti dan terselenggara			6 kejuaraan	6 kejuaraan	100%			
2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Kejuaraan Multieven dan Single Even Yang Diikuti			0 Kejuaraan	0 Kejuaraan	0%			
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi			8 Cabang Olahraga	8 Cabang Olahraga	100%			
2.19.03.1.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet yang terseleksi			100 Atlet	100 Atlet	100%			
2.19.03.1.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Olahraga (PPLP) per Tahun			147 Orang	147 Orang	100%			
2.19.03.1.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Pusat pembibitan dan pembinaan olahraga			31 Orang	31 Orang	100%			
2.19.03.1.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah penghargaan yang diberikan bagi insan olahraga			200 Orang	200 Orang	100%			
2.19.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sektoral Olahraga			2 Dokumen	2 Dokumen	100%			

KODEFIKASI	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	*(Renstra Perangkat daerah) Tahun 2019 s/d 2024	Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)*100
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Sumberdaya keolahragaan yang mampu menjalankan organisasi olahraga secara profesional			0 Orang	0 Orang	0,00			
2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina			3 Organisasi	3 Organisasi	100%			
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah pemuda kader			1200 Orang	75 Orang	6%			
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepanduan yang Siap menjadi wadah pengembangan Kepramukaan			1 Organisasi	1 Organisasi	100%			
2.19.04.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina			1 Organisasi	1 Organisasi	100%			

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Dari tabel. 2.1 hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdapat 2 program di Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yaitu :

- a. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
- b. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Dari tabel. T-C.29 hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdapat 1 program di Dinas Kebudayaan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan Yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

- a) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah adanya Wabah Covid 19, sehingga kebijakan baik Pemerintah Pusat maupun Daerah menunda bahkan membatalkan kegiatan yang berpotensi meningkatnya kasus Covid 19.
- b) Faktor-faktor penyebab terpenuhinya capaian target kinerja untuk beberapa kegiatan yang bukan berkategori resiko tinggi penularan Covid19 dengan tetap menjalankan Protokol Kesehatan yang ketat, kegiatan tersebut berupa pemeliharaan asset sarana prasarana olahraga.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dari Tabel 2.1 yang diambil dari T-C.29 Implikasi yang timbul dari capaian kinerja keluaran kegiatan urusan Kepemudaan dan Olahraga yakni :

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Jika melihat implikasi dari hasil evaluasi Renja 2021 secara keseluruhan akan berdampak pada capaian Sasaran dan Tujuan Perangkat Daerah dan selanjutnya akan berdampak pada misi yang dicapai dalam RPJMD, maka perlu dibuat kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran mengingat potensi gangguan wabah covid ini akan ada beberapa tahun ke depan yakni :

- Mengusulkan kembali di tahun berikutnya kegiatan yang sempat tertunda agar target akhir Renstra 2019 – 2024 tercapai
- Merevisi target yang realistis dengan kondisi wabah covid 19
- Menyusun kembali Program dan Kegiatan yang Prioritas yang masih memungkinkan untuk dijalankan dalam kondisi Covid 19.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimana Tujuan akhir otonomi daerah ditunjukkan dengan parameter tinggi kualitas manusia yang secara internasional diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM), dalam EKPOD, IPM ini digunakan untuk mengecek apakah aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dapat dipertanggungjawabkan. Khusus Dinas Kepemudaan dan Olahraga antara lain :

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Fokus Seni Budaya dan Olahraga, yakni :

- ✓ Jumlah Klub Olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk
- ✓ Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk

B. Aspek Pelayanan Umum

Fokus Pelayanan Penunjang, yakni :

- ✓ Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif
- ✓ Jumlah Organisasi Olahraga yang Aktif
- ✓ Jumlah Kegiatan (event) Kepemudaan dalam periode 1 (satu) tahun
- ✓ Jumlah Kegiatan (even) Olahraga dalam periode 1 (satu) tahun

Berikut Tabel 2.2 yang diambil dari Tabel T-C.30

Tabel 2.2a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Riau

[illegible]

Tabel 2.2b

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Riau

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi	-	-	15,30	41,36	39,07	40,46		0	39,07	40,46		
	kepemudaan dan organisasi sosial												
	kemasyarakatan (Persen)												
2.	Persentase partisipasi pemuda dalam ekonomi	-	-	7,90	5,30	5,00	5,20		0	5,00	5,20		
	mandiri (Persen)												
3.	Jumlah Atlet yang Mengikuti Event Wilayah dan Nasional (Orang)	-	-	200	215	352	214		0	352	214		

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

A. Bidang Kepemudaan

Jumlah penduduk Indonesia saat ini lebih dari 252,04 juta orang. Dari jumlah tersebut, kelompok yang dikategorikan generasi muda diperkirakan berjumlah sekitar 61,83 juta jiwa atau 24,53 persen dari jumlah penduduk seluruhnya. Sebagian besar dari kelompok usia ini adalah tenaga kerja produktif yang akan mengisi berbagai bidang kehidupan. Pemuda akan menempati posisi penting dan strategis, sebagai pelaku-pelaku pembangunan maupun sebagai generasi penerus untuk berkiprah di masa depan. Karena itu, pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing, guna menghadapi tuntutan, kebutuhan, serta tantangan dan persaingan di era global.

Hal yang sama terdapat di provinsi Riau, data perkembangan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 6.500.971 jiwa . Sementara jumlah penduduk yang berusia muda 1.707.497 Jiwa atau 26,27 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun kedepan jumlah pemuda di provinsi Riau merupakan kelompok terbesar dalam populasi penduduk.

Memperhatikan jumlah pemuda yang secara kuantitatif potensial, maka kelompok pemuda merupakan subjek sekaligus objek pembangunan yang penting. Pembangunan bidang kepemudaan merupakan mata rantai tak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang bagi keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu pembangunan kepemudaan dianggap sebagai salah satu program yang tidak dapat diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa di masa depan. Sesuai dengan visi dan arah kebijakan pembangunan pemuda dalam

RPJM Nasional, maka perencanaan pembangunan nasional pada bidang kepemudaan dan keolahragaaan untuk lima tahun kedepan maka ditetapkan sasaran pembangunannya adalah:

- (1) Meningkatnya keserasian berbagai kebijakan pemuda di tingkat nasional dan daerah;
- (2) Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan;
- (3) Meningkatnya keserasian berbagai kebijakan olahraga di tingkat nasional dan daerah;
- (4) Meningkatnya kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat serta prestasi olahraga;

Upaya mempersiapkan, membangun dan memberdayakan pemuda agar mampu berperan serta sebagai pelaku-pelaku aktif pembangunan bangsa Indonesia, dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan. Munculnya berbagai permasalahan sosial yang melibatkan atau dilakukan pemuda, seperti tawuran dan kriminalitas lainnya, penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif lainnya (NAZA), minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular, penyaluran aspirasi dan partisipasi, serta apresiasi terhadap kalangan pemuda. Apabila permasalahan ini tidak memperoleh perhatian atau penanganan bijaksana, akan memiliki dampak yang luas dan mengganggu kesinambungan, kestabilan dalam pembangunan nasional, bahkan mungkin akan mengancam integrasi bangsa.

Permasalahan lainnya adalah ketahanan budaya dan kepribadian nasional di kalangan pemuda yang semakin luntur, yang disebabkan cepatnya perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi, akibat dari derasnya arus informasi global yang berdampak pada penetrasi budaya asing. Hal ini mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku pemuda Indonesia. Persoalan tersebut dapat dilihat kurang berkembangnya kemandirian, kreativitas, serta produktivitas di kalangan pemuda, sehingga pemuda kurang dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan karakter bangsa.

Permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah era globalisasi yang terjadi di berbagai aspek kehidupan sangat mempengaruhi daya saing pemuda. Sehingga pemuda baik langsung maupun tidak langsung dituntut untuk mempunyai keterampilan baik bersifat keterampilan praktis maupun keterampilan yang menggunakan teknologi tinggi untuk mampu bersaing dalam menciptakan lapangan kerja/mengembangkan jenis pekerjaan yang sedang dijalannya.

Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka tantangan pembangunan bidang pemuda dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah munculnya gerakan demokrasi dan pemajuan HAM yang akan memunculkan masalah-masalah baru di bidang kepemudaan. Disertai dengan laju globalisasi akan memberikan dampak pada persoalan identitas dan integritas bangsa di kalangan pemuda. Hal ini akan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, serta upaya pembentukan moral dan agama yang kuat di kalangan pemuda. Tantangan lain adalah belum terumuskannya kebijakan pembangunan bidang pemuda secara serasi, menyeluruh, terintegrasi dan terkoordinasi antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan di tingkat daerah. Selanjutnya tantangan yang dihadapi adalah:

Pertama, dalam kaitannya dengan perluasan dan pemerataan kesempatan, ialah derasnya arus mobilisasi pemuda baik yang berpendidikan maupun yang putus sekolah dari desa ke kota dan dari lapangan pekerjaan di bidang pertanian yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan, kepada pekerjaan/jasa yang dapat menghasilkan dalam jangka pendek. Sehingga terjadi penumpukan pemuda pada satu jenis pekerjaan tertentu yang berada di perkotaan.

Kedua, dalam kaitannya dengan peningkatan mutu dan relevansi, adalah munculnya gerakan demokratisasi dan pemajuan HAM yang akan memunculkan masalah-masalah baru di bidang kepemudaan. Disertai dengan laju globalisasi akan memberikan dampak pada persoalan identitas dan integritas bangsa serta pembentukan moral

dan agama yang kuat di kalangan pemuda dan juga kepedulian terhadap lingkungan.

Ketiga, dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas kepemudaan, ialah belum terumuskannya kebijakan pembangunan di bidang kepemudaan secara serasi, menyeluruh, terintegrasi dan terkoordinasi antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan di tingkat daerah

B. Bidang Keolahragaan

Dalam kehidupan modern olahraga telah menjadi tuntutan dan kebutuhan hidup agar lebih sejahtera. Olahraga semakin diperlukan oleh manusia dalam kehidupan yang semakin kompleks dan serba otomatis, agar manusia dapat mempertahankan eksistensinya terhindar dari berbagai gangguan atau disfungsi sebagai akibat penyakit kekurangan gerak (*Hypo Kinesis Disease*). Olahraga yang dilakukan dengan tepat dan benar akan menjadi faktor penting yang sangat mendukung untuk pengembangan potensi diri. Kampanye "Ayo Olahraga" dan "Ayo Bergerak" ini selalu disampaikan kepada Pelajar, Mahasiswa, Pemuda, Pemudi dan Masyarakat.

Kesehatan, kebugaran jasmani dan sifat-sifat kepribadian yang unggul adalah faktor yang sangat menunjang untuk pengembangan potensi diri manusia, dan melalui pendidikan jasmani, rekreasi, dan olah raga yang tepat faktor-faktor tersebut dapat diperoleh. Melalui melalui pembinaan olahraga yang sistematis, kualitas SDM dapat diarahkan pada peningkatan pengendalian diri, tanggungjawab, disiplin, sportivitas yang tinggi yang mengandung nilai transfer bagi bidang lainnya. Berdasarkan sifat-sifat itu, pada akhirnya dapat diperoleh peningkatan prestasi olah raga yang dapat membangkitkan kebanggaan nasional dan ketahanan nasional secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pembangunan olahraga perlu mendapat perhatian yang lebih proporsional melalui perencanaan dan pelaksanaan yang sistematis dalam pembangunan nasional.

Hakekat pembangunan olahraga adalah upaya dan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga yang merupakan bagian upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang utamanya ditujukan untuk pembentukan watak dan kepribadian termasuk sifat-sifat disiplin, sportivitas

dan etos kerja yang tinggi. Berdasarkan kualitas kesehatan akan tercapai peningkatan prestasi olahraga yang dapat membangkitkan kebanggaan nasional dan membawa nama harum bangsa.

Penyelenggaraan pembangunan olahraga nasional utamanya didasarkan pada kesadaran serta tanggungjawab segenap warga negara akan hak dan kewajibannya dalam upaya untuk berpartisipasi guna peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui olahraga sebagai kebiasaan dan pola hidup, serta terhentuknya manusia dengan jasmani yang sehat, bugar, memiliki watak dan kepribadian, disiplin, sportivitas, dan dengan daya tahan yang tinggi akan dapat meningkatkan produktivitas, etos kerja dan prestasi.

Pembangunan olahraga selama ini dilaksanakan lewat dua jalur. Jalur pertama adalah melalui jalur pendidikan, yang penyelenggaraannya dikoordinasikan oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga dan kementrian pendidikan nasional, dan kedua adalah pembangunan olahraga lewat jalur masyarakat yang penyelenggaraannya selama ini di koordinasikan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), sebagai organisasi yang mewakili unsur masyarakat. Pembangunan olahraga lewat jalur pendidikan atau sekolah dikenal dengan istilah pendidikan jasmani (*physical education*) ditempuh dengan cara memasukkan muatan pendidikan jasmani ke dalam satuan pelajaran pada setiap jalur dan jenjang pendidikan, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi baik intra maupun ekstrakurikuler. Sedangkan pelaksanaan pembangunan olahraga lewat jalur masyarakat, ditempuh melalui serangkaian kegiatan yang serasi untuk tujuan peningkatan prestasi meliputi, pemasalan, pemanduan bakat, pembibitan calon atlet, pembinaan atlet, serta peningkatan prestasi atlet. Keseluruhan kegiatan itu membutuhkan dukungan iptek keolahragaan. Secara umum kebijakan pembangunan keolahragaan diarahkan pada upaya pemasalan, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga. Kebijakan ini ditujukan terhadap 5 fokus utama yaitu: Olahraga dan pembangunan, Olahraga dan perdamaian, Olahraga dan pendidikan, Olahraga dan kesehatan, Olahraga dan prestasi

Pelaksanaan program-program pembangunan tersebut dilakukan secara merata, sistematis dan terpadu untuk seluruh lapisan masyarakat di

seluruh tanah air dengan menyesuaikan kondisi geografi dan budaya bangsa, serta melibatkan seluruh potensi dan kekuatan bangsa sehingga dapat diwujudkan suatu keluarga, masyarakat, dan bangsa yang memiliki kemampuan olahraga yang tangguh, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu kehidupan dan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan olahraga dewasa ini, secara umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal utama, dalam kaitannya dengan bidang pendidikan jasmani olahraga itu sendiri. Sejalan dengan kebijakan nasional yang akan ditempuh dibidang olahraga, maka permasalahan akan dirumuskan dalam kaitannya dengan empat (4) tema utama program pembangunan olahraga nasional yang tertuang di dalam RPJM, adalah sebagai berikut: *Pertama*, permasalahan dalam kaitannya dengan pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga di tingkat nasional dan di provinsi Riau. Masalah paling kritis dalam pembangunan olahraga di provinsi Riau dewasa ini adalah ketidakmampuan pemerintah daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota termasuk didalamnya KONI dan PENGPROV/PENGKAB/PENGKOT untuk melaksanakan upaya pembinaan yang berlandaskan pada sebuah sistem manajemen yang mantap, yang ditandai dengan adanya interkoneksi dan keterpaduan segenap unsur terkait baik di daerah maupun ke tingkat nasional. Selama ini, perumusan dan pelaksanaan kebijakan olahraga provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai wakil pemerintah, dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), beserta PENGPROV dan PENGKAB/PENGKOT olahraga yang ada sebagai unsur masyarakat. Di sisi lain kinerja dari kedua institusi tersebut terbukti memang belum mampu mewujudkan adanya keserasian dalam penerapan kebijakan di bidang keolahragaan di provinsi riau, yang pada akhirnya berujung pada lemahnya proses pembinaan dan tidak tercapainya target-target yang diharapkan dalam pembinaan keolahragaan Riau.

Sejalan dengan desentralisasi pembangunan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah dengan dikeluarkannya UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam hal titik berat pelaksanaan pembangunan

olahraga pun, tidak hanya bergeser dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi juga harus lebih mengarah pada pemberdayaan dan pembangkitan partisipasi masyarakat, sementara pemerintah lebih bergerak sebagai fasilitator dan motivator.

Kedua, permasalahan dalam kaitannya dengan pemassalan olahraga dan kesegaran jasmani. Selama ini, masyarakat merupakan potensi utama dalam mendukung dan memacu peningkatan kemajuan olahraga di provinsi Riau belum diberdayakan secara optimal. Dengan kondisi kesegaran jasmani masyarakat termasuk generasi muda hingga dewasa ini yang masih belum memadai seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu, masyarakat perlu semakin didorong peransertanya dalam membangun kemandirian olahraga antara lain melalui perumusan kebijakan yang lebih mengarah pada upaya untuk memfasilitasi dan memotivasi masyarakat untuk lebih menghidupkan klub-klub olahraga prestasi, memantapkan gerakan olahraga massal, olahraga pendidikan (pendidikan jasmani) serta olahraga rekreasi.

Upaya Melestarikan olahraga tradisional, pengelolaan olahraga khusus dan olahraga rehabilitasi adalah permasalahan yang perlu diatasi di provinsi Riau. Kegiatan itu diharapkan dapat terselenggara atas dasar semangat swakelola dan swadana. Sementara itu, aspek ekonomi olahraga membutuhkan perhatian sejalan dengan pengembangan industri olahraga. Sinyalemen tentang derajat kesegaran jasmani yang rendah pada semua lapisan masyarakat merupakan masalah serius, karena berkaitan dengan pemeliharaan ketahanan pribadi, rendahnya produktivitas, dan rendahnya derajat kesehatan dinamis yang dapat menjadi ancaman bagi masyarakat di provinsi Riau dan berpengaruh terhadap ancaman nasional.

Ketiga, permasalahan dalam kaitannya dengan pemanduan bakat dan pembibitan olahraga. Berdasarkan ukuran-ukuran internasional, kinerja program pemanduan bakat dan pembibitan olahraga yang dilaksanakan di Indonesia masih kurang sistematis yang berbuah pada ketidak mampuan atlet-atlet Indonesia dalam cabang olahraga tertentu untuk mampu bersaing di tingkat internasional. Hal yang sama juga terjadi di provinsi Riau. Program pemanduan bakat bagi para atlet-atlet daerah belum sesuai dengan ukuran yang baku sesuai dengan standar internasional. Oleh sebab itu, perlu

diciptakan model dan perencanaan program pamanduan bakat dan pembibitan yang lebih sistematis dan terpadu, guna mendukung pembinaan yang berjenjang dan berkesinambungan, melalui penerapan metoda yang tepat dengan memanfaatkan iptek olahraga. Selanjutnya bibit-bibit olahragawan berbakat yang berhasil diidentifikasi perlu dibina melalui pusat pembinaan seperti PPLP. Pada saat ini, secara keseluruhan, pembinaan olahraga masih bersifat sporadis dan kurang didasarkan pada orientasi jangka panjang dan masih bersifat dadakan pada saat menjelang pelaksanaan event pertandingan olahraga. Keadaan seperti tersebut merupakan suatu kondisi yang bertentangan dengan kenyataan, bahwa pencapaian prestasi olahraga memerlukan waktu cukup panjang antara 10-12 tahun untuk dapat mencapai puncak usia prestasi, sesuai dengan watak olahraga masing-masing. Tuntutan ideal dalam program pembibitan calon atlet tersebut masih jauh dari pelaksanaan di provinsi Riau.

Keempat, permasalahan dalam kaitannya dengan prestasi olahraga. Berbagai event olahraga yang diikuti oleh atlet dari provinsi Riau terjadi penurunan dalam prestasi yang diperoleh. Permasalahan yang cukup serius dihadapi dalam masalah ini adalah lemahnya landasan pembinaan yang selama ini dilaksanakan lewat pendidikan jasmani, disertai dengan dukungan partisipasi masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, pendidikan jasmani perlu dikembangkan secara intensif dan komprehensif dengan memperhatikan komponen kurikulum, guru, sarana dan prasarana. Sedangkan, proses pembinaan dengan model piramid yang berkesinambungan dari usia dini, yunior, hingga atlet senior, juga kurang terwujud.

Dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan di atas, maka tantangan pembangunan olahraga di provinsi Riau untuk kurun waktu lima tahun kedepan (2019 - 2024) adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam kaitannya dengan pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga di provinsi Riau, adalah bagaimana mengupayakan langkah-langkah untuk terciptanya sistem koordinasi antar unit terkait baik di tingkat provinsi Riau sampai tingkat daerah Kabupaten/Kota sehingga dapat mewujudkan adanya keserasian dalam perumusan kebijakan olahraga provinsi Riau. Pada akhirnya diharapkan akan terjadi perubahan secara

bertahap dan berkesinambungan dalam pengembangan dan pembinaan olahraga.

Kedua, dalam kaitannya dengan permasalahan olahraga dan kesegaran jasmani, adalah bagaimana mendorong partisipasi aktif masyarakat agar lebih peduli dengan kegiatan olahraga dan kemaslahatan yang diperoleh, seperti kondisi kesehatan paripurna, dan dampak pengiring lainnya seperti peningkatan produktivitas. Kegiatan kesegaran jasmani melalui penerangan/penyuluhan yang sistematis dengan lebih menggelorakan panji olahraga yaitu "Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat". Selain itu, bagaimana meningkatkan dukungan masyarakat dalam pembinaan olahraga, terutama dalam kaitannya dengan penggalan sumber-sumber dana dari masyarakat secara legal dan transparan, sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana olahraga dapat dipenuhi di provinsi Riau dan Kabupaten Kota yang ada.

Ketiga, dalam kaitannya dengan pemanduan bakat dan pembibitan olahraga adalah bagaimana menciptakan suatu sistem pemanduan bakat dan pembibitan olahraga baik lewat jalur sekolah maupun lewat jalur prestasi olahraga dengan didukung oleh tenaga-tenaga yang profesional dan penanganan yang terpadu. Untuk itu maka menjadi perlu dibuatnya manajemen pemanduan bakat dan pembibitan olahraga yang didukung dengan sarana dan prasarana olahraga yang sesuai dengan standar yang ideal.

Keempat, dalam kaitannya dengan prestasi olahraga adalah bagaimana meningkatkan daya saing provinsi Riau dalam event-event olahraga baik di tingkat nasional dan internasional sehingga memberikan citra dan nama bagi provinsi Riau yang lebih baik di tingkat nasional dan di ASEAN sesuai dengan visi Riau.

2.3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam melakukan analisis lingkungan, selain mempertimbangkan kondisi umum sebagaimana diuraikan di atas, sangat perlu untuk menganalisis kondisi objektif berkaitan dengan tugas pokok Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau. Hal-hal yang dianalisis menyangkut faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap

keberlanjutan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi Riau. Faktor internal yang berdampak positif dianggap sebagai kekuatan dan yang berdampak negatif dianggap sebagai kelemahan sesuai dengan analisis lingkungan (*SWOT Analisis*).

Dalam rangka mengantisipasi dan memberikan respon terhadap perkembangan dan memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pemuda dan olah raga dan menghadapi kompetisi yang semakin meningkat, maka aspek eksternal (peluang dan tantangan) lebih diperhatikan dibanding aspek internal (kekuatan dan kelemahan).

A. Kekuatan (Strength)

Bidang Kepemudaan :

- a. Jumlah penduduk usia muda di Provinsi Riau cukup besar sekitar 41,7 persen dari seluruh penduduk Riau.
- b. Pemuda dalam rentang usia produktif dan berpotensi mandiri secara ekonomi masih dominan pada setiap kabupaten dan kota, data menunjukkan sebanyak rata-rata 52,2 persen adalah pemuda.
- c. Posisi dan peran strategis pemuda dalam proses perubahan bangsa dan negara.
- e. Keanekaragaman dan kekayaan budaya lokal menjadi modal kemandirian pemuda.

Bidang Keolahragaan :

- a. Besarnya anak usia dini yang berpotensi dalam olahraga.
- b. Kekayaan dan sumber daya alam yang luas, indah merupakan potensi yang besar untuk dibudayakan menjadi lahan yang menjanjikan bagi perkembangan wisata olahraga (Sport Tourism).
- c. Olahraga sudah berkembang menjadi milik masyarakat dan daerah sehingga, aktivitas olahraga dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan daerah.
- d. Semakin disadarinya manfaat olahraga bagi perbaikan dan pemeliharaan kesehatan fisik dan mental serta bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- e. Majunya telekomunikasi, transportasi dan teknologi informasi memposisikan olahraga sebagai budaya dan kebutuhan masyarakat global, baik sebagai hiburan, tantangan, sarana rekreasi dan wisata.

B. Kelemahan (weaknesses)

Bidang Kepemudaan :

- a. Belum serasinya berbagai kebijakan pembinaan kepemudaan antar instansi terkait, LSM dan masyarakat.
- d. Masih rendahnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan.
- e. Rendahnya keterampilan pemuda untuk siap memasuki dunia kerja.
- f. Kemampuan dan minat wirausaha rendah.
- g. Rendahnya minat pemuda (tak acuh) terhadap budaya lokal.

Bidang Keolahragaan :

- a. Rendahnya motivasi orang tua terhadap anaknya yang menekuni olahraga.
- b. Terbatasnya dana yang dialokasikan untuk pembinaan dan kegiatan olahraga.
- c. Terbatasnya dan masih kurangnya Sarana dan Prasarana / Fasilitas yang diperlukan.
- d. Belum adanya sistim informasi keolahragaan yang dikelola secara profesional.
- e. Lemahnya koordinasi dan kerjasama antarorganisasi olahraga dan antarprofesi.
- f. Kurang profesionalnya pelatih dan pembinaan olahraga.

C. Peluang (Opportunities)

Bidang Kepemudaan :

- a. Kebijakan pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan pemuda.
- b. Perkembangan media masa dan teknologi informasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga.
- c. Pemuda sebagai pewaris Generasi
- d. Semakin terbukanya lapangan usaha berbasis sumber daya alam.
- e. Potensi pemuda sebagai penggerak sektor Ekonomi.
- f. Globalisasi berdampak open minded dan akses kerjasama dengan dunia internasional.

Bidang Keolahragaan :

- a. Makin majunya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya olahraga sebagai upaya peningkatan kualitas hidup.

- b. Makin majunya industri hiburan, tontonan, rekreasi dan pariwisata yang berbasis olahraga.
- c. Digalakkannya olahraga sebagai salah satu kekuatan pembangunan unggulan yang diandalkan bagi pembangunan Daerah melalui keberadaan Dinas Pemuda dan Olahraga.
- d. Semakin disadarinya posisi dan peran olahraga sebagai salah satu upaya ampuh dalam pembentukan watak disiplin, produktivitas, prestasi, budaya kerja dan kepribadian bangsa.
- f. Lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

D. Tantangan (*Threats*)

Bidang Kepemudaan :

- a. Beredarnya momenklatur kelembagaan di Kab/Kota yang menangani bidang pemuda.
- b. Belum serasinya berbagai kebijakan di bidang kepemudaan baik di tingkat Propinsi maupun Nasional.
- c. Tingginya tingkat urbanisasi sebagai akibat daya tarik kehidupan kota yang lebih kuat ketimbang di daerah pedesaan.
- d. Persaingan tidak sehat dalam menjalankan bisnis dan masih kuatnya budaya jalan pintas.
- e. Fanatisme sempit sebagai akibat kurangnya pemahaman atas wawasan kebangsaan.
- f. Penyebaran NARKOTIKA, Perjudian, maraknya Pornografi dan Pornoaksi serta bertambahnya penderita HIV/AIDS sudah berada pada tahap mengkhawatirkan.
- g. Adanya Deskriminasi Gender.
- h. Era pasar bebas membuat masuknya pelaku ekonomi asing dengan modal dan teknologi yang tinggi.

Bidang Keolahragaan :

- a. Kurangnya Sistem Manajemen pengelolaan Olahraga di Provinsi Riau serta kurang terpadu dan selarasnya kebijakan pembinaan olahraga.
- b. Adanya serbuan barang/produk peralatan dan perlengkapan olahraga dari Negara – Negara ASEAN dan kawasan Asia Pasifik lainnya, yang harganya relatif lebih murah, lebih kuat, lebih menarik, lebih bermutu dan awet.

- c. Sarana dan Prasarana olahraga yang tidak memenuhi standar.
- d. Banyaknya anak yang terjebak dalam budaya kurang gerak (hipakinetik) yang diakibatkan berbagai program media elektronik.
- e. Kurangnya penghargaan yang berakibat kurangnya kesejahteraan bagi masyarakat olahraga.
- f. Masuknya Tenaga kerja olahraga (atlit) dari luar Negeri (khususnya pemain Sepak Bola)

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2023

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan maksud untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerja pencapaian target yang ada dan telah disusun dalam Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Selain itu review ini didasarkan pada tingkat kinerja yang dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan rancangan awal RKPD.

Proses yang dilakukan dalam review ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi prioritas program dan kegiatan yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD
2. Menentukan indikator kinerja program/kegiatan dengan cara membandingkan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dengan hasil analisis yang dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya.
3. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama.
4. Melakukan pengecekan apakah program/kegiatan prioritas telah termuat dalam rancangan awal RKPD atau belum.

5. Identifikasi program/kegiatan yang sesuai dan tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
6. Menentukan program dan kegiatan lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, tolok ukur atau target sasaran program/ kegiatan dan pagu indikatif/besaran dana yang dibutuhkan dan dialokasikan untuk setiap program/kegiatan

Berikut ditampilkan review RKPD Provinsi Riau Tahun 2023 yang menyangkut urusan kepemudaan dan keolahragaan sebagaimana Tabel 2.3 yang diambil dari Tabel T-C31

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun Anggaran 2023

Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	19	01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	4	5	6	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	9	10	11	12
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARAGA				72.752.029.421	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARAGA				113.900.669.222	
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	100 Persen	21.692.688.451	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	100 Persen	22.888.497.059	
2	19	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	100 Persen	13.937.502.421	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	100 Persen	14.612.859.413	
2	19	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/ Bulan	13.937.502.421	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/ Bulan	14.612.859.413	Penyesuaian kondisi terakhir ASN Dispora Prov. Riau
2	19	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	100 Persen	1.142.734.995	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	100 Persen	1.616.185.995	
2	19	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.750.502	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.750.502	

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2 19 01 1,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	266.729.992	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	266.729.992				
2 19 01 1,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000				
2 19 01 1,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	51.048.501	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	51.048.501				
2 19 01 1,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	642.206.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	1.115.657.000				
2 19 01 1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	100 Persen	94.047.263	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	100 Persen	94.047.263				
2 19 01 1,07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	94.047.263	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	94.047.263				
2 19 01 1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	100 Persen	6.156.897.872	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	100 Persen	6.203.898.488				
2 19 01 1,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	21 Laporan	2.742.519.420	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	21 Laporan	2.742.519.420				

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 19 01 1.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	3.414.378.452	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	3.461.379.068	Adanya Penambahan pada belanja bahan dan peralatan kebersihan mengacu pada kebutuhan
2 19 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	100 Persen	361.505.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	100 Persen	361.505.900	
2 19 01 1.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	139.210.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	139.210.000	
2 19 01 1.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	22.862.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	22.862.500	
2 19 01 1.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	82.253.400	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	82.253.400	
2 19 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	117.180.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	117.180.000	
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Jumlah Pemuda yang dibina	685 Orang	3.530.375.564	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Jumlah Pemuda yang dibina	685 Orang	4.530.375.564	

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
2	19	02	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		Jumlah Pemuda Yang Berkompetensi aktif berorganisasi dan berwirausaha	685 Orang	3.328.448.249	Penyadaran, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		Jumlah Pemuda Yang Berkompetensi aktif berorganisasi dan berwirausaha	685 Orang	4.328.448.249	
2	19	02	1.01	1		Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	25 Orang	152.368.529	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi		Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	25 Orang	152.368.529	
2	19	02	1.01	2		Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	424.061.202	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi		Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	1.424.061.202	Penambahan Pagu untuk memenuhi target peserta pelatihan sebanyak 100 orang
2	19	02	1.01	3		Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	282 Orang	583.083.995	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi		Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	282 Orang	583.083.995	
2	19	02	1.01	4		Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	38 Orang	1.393.377.536	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	38 Orang	1.393.377.536	
2	19	02	1.01	5		Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	188.299.710	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi		Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	188.299.710	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	19 02 1.01 6	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	1 Dokumen	182.768.348	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi		Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	1 Dokumen	182.768.348	
2	19 02 1.01 8	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	1 Dokumen	155.333.979	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	1 Dokumen	155.333.979	
2	19 02 1.01 9	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	211 Orang	249.154.950	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	211 Orang	249.154.950	
2	19 02 1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemuda Yang siap berperanaktif dalam masyarakat	685 Orang	201.927.315	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pemuda Yang siap berperanaktif dalam masyarakat	685 Orang	201.927.315	
2	19 02 1.02 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	50 Orang	52.400.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha		Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	50 Orang	-	Sub kegiatan ini tidak terlalu urgen dan prioritas sehingga ditunda/dibatalkan

Kode			Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	19 03	1.03	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	19 03	1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina	29 Cabor	9.893.568.397	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina	29 Cabor	10.093.488.297		
2	19 03	1.03	Seleksi Atlet Daerah		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	188.299.982	Seleksi Atlet Daerah		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	188.299.982		
2	19 03	1.03	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	15 Pelatda	8.153.882.111	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	15 Pelatda	8.353.802.011		
2	19 03	1.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi		Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	214 Orang	890.141.174	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi		Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	214 Orang	890.141.174		
2	19 03	1.03	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi		Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	140 Orang	564.899.745	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi		Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	140 Orang	564.899.745		
2	19 03	1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga		Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	96.345.385	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga		Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	96.345.385		
2	19 03	01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina	29 Cabor	21.663.955.839	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina	29 Cabor	56.763.284.000		
2	19 03	1.04	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	4 Dokumen	21.663.955.839	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	4 Dokumen	56.763.284.000		Penyesuaian Belanja Hibah KONI, NPC, dan SOLna

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Jumlah pemuda yang dibina menjadi kader pramuka	50 Orang	3.100.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Jumlah pemuda yang dibina menjadi kader pramuka	50 Orang	3.198.736.000	
2 19 04 1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Provinsi Yang Dibina	1 Organisasi	3.100.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Provinsi Yang Dibina	1 Organisasi	3.198.736.000	
2 19 04 1.01 2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi		Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	3.100.000.000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi		Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	3.198.736.000	Penyesuaian Belanja Hibah Kepramukaan dan penambahan kebutuhan money dan penunjang lainnya
TOTAL					72.752.029.421	TOTAL					113.900.669.222

Dari paparan Tabel 2.3 secara umum tidak ada perbedaan berarti antara Rancangan awal terhadap analisis kebutuhan, tetapi ada beberapa Sub kegiatan yang perlu menjadi catatan khusus, antara lain

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Adanya penambahan pagu dari Rancangan Awal dikarenakan penghitungan kembali kondisi terkini jumlah ASN berikut kelengkapannya seperti Tunjangan, kenaikan gaji berkala, pensiun, dan lain-lain.

2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Adanya peningkatan cukup signifikan dengan mempertimbangkan monitoring beberapa kegiatan yang berada dalam belanja hibah

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Adanya penambahan untuk belanja bahan dan peralatan kebersihan mengacu pada kebutuhan dan kondisi yang ada

4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi

Penambahan pagu untuk memenuhi target peserta pelatihan sebanyak 100 orang

5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha

Sub kegiatan ini tidak terlalu prioritas sehingga ditunda/dibatalkan untuk Tahun 2023

6. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi

Adanya penambahan peserta Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan sehingga diperlukan penambahan pagu

7. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi

Diperlukan penambahan anggaran untuk memenuhi target penyelenggaraan even

8. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event

Diperlukan penambahan anggaran untuk mengikuti beberapa even nasional.

9. Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
10. Pengembangan Organisasi Keolahragaan
Pagu Belanja Hibah KONI, NPC, dan SOIna sesuai dengan kesepakatan TAPD
11. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
Penyesuaian Belanja Hibah Kepramukaan dan Penambahan kebutuhan dan penunjang lainnya.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tingkat Perangkat Daerah Provinsi adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penilitan lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Menelaah usulan program dan kegiatan yang disampaikan, sebagian besar merupakan bukan kewenangan Pemerintah Provinsi dan tidak sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Sedangkan beberapa program kegiatan yang lain merupakan kegiatan yang sudah sesuai Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Berikut beberapa usulan masyarakat yang masuk melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau yang dipaparkan Tabel 2.4 diambil dari Tabel T-C.32

Tabel 2.4 (TC.32)
 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
 Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kota Pekanbaru, Kab. Kampar	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Kab. Rokan Hulu, Kab. Kampar, Kota Dumai, Kab. Rokan Hilir, Kab. Bengkalis, Kab. Siak, Kota Pekanbaru, Kab. Pelalawan	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kab. Kepulauan Meranti, Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota		
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Kab. Kepulauan Meranti, Kab. Siak, Kota Pekanbaru, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan		
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga				
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Kota Pekanbaru, Kab. Kuantan Singingi,	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional				
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kota Pekanbaru,	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Kota Dumai, Kab. Kep Meranti, Kab. Bengkalis, Kota Pekanbaru, Kab. Rokan Hilir,	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		



PROVINSI RIAU

3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan penekanan pada 10 (sepuluh) pada prioritas utama dalam Nawacita “Kami akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga”, yaitu :

1. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan ketampilan;
2. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan social, politik, ekonomi, budaya, dan agama;
3. Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan;
4. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan Penyakit menular seksual dikalangan pemuda;
5. Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;

6. Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa;
7. Meningkatkan Sarana Prasarana Olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
8. Meningkatkan upaya pendidikan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistemik, berjenjang dan berkelanjutan;
9. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

Sedangkan arah kebijakan dan strategi dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, yakni :

1. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui :
 - a. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan ketampilan.
 - b. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan social, politik, ekonomi, budaya, dan agama.
 - c. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan.
 - d. Pelindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda.
2. Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi melalui :
 - a. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga alam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan.
 - b. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa.
 - c. Peningkatan Sarana Prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga.

- d. Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan;
 - e. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industry olahraga; dan
 - f. Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan
3. Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, dan profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda diberbagai bidang pembangunan melalui :
- a. Bela Negara;
 - b. Kompetisi dan Apresiasi pemuda;
 - c. Peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
 - d. Pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktifitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Peningkatan kapasitas dan potensi pemuda;
 - f. Pendampingan pemuda;
 - g. Perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan;
 - h. Penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya;
 - i. Pengembangan pendidikan kepramukaan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga melalui :
- a. Peningkatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha/swasta dalam pembudayaan kegiatan olahraga, termasuk media massa.

- b. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.
 - c. Pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai sumber pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.
5. Meningkatkan Prestasi Olahraga ditingkat regional dan internasional melalui :
- a. Penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan
 - b. Penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan.
 - c. Pengembangan dan penerapan iptek keolahragaan.
 - d. Pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan keolahragaan
 - e. Peningkatan dukungan Industri olahraga dalam pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan Renja Perangkat Daerah

Adapun Tujuan dari Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah :

- 1. Meningkatkan Pembangunan pemuda yang berkarakter, maju, dan mandiri
- 2. Meningkatkan Prestasi Olahraga

3.2.2. Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berikut sasaran dari Rencana Kerja Dinas kepemudaan dan Olahraga yang ditampilkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Sasaran Renja Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Pembangunan pemuda yang berkarakter, maju, dan mandiri		Persentase pemuda yang dibina menjadi pemuda pelopor (%)	41,36
		1.1. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (%)	41,36
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam ekonomi mandiri	5,30
2.	Meningkatkan Prestasi Olahraga		Jumlah Atlit yang Berprestasi Ditingkat Wilayah dan Nasional (Orang)	91
		2.1. Meningkatnya Atlet yang Mengikuti Event Wilayah dan Nasional	Jumlah Atlet Yang Mengikuti Event Wilayah dan Nasional (Orang)	215

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

- Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau
- Pencapaian Indeks Pembangunan Kepemudaan

3.3.2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 telah digunakan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kemendagri Nomor 050-5882 Tahun 2021, sehingga Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 juga mengacu pada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan pada RKPD tersebut. Pemetaan program dan kegiatan pada Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga ke program, kegiatan, sub kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5882 Tahun 2021 sebagaimana lampiran.

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan dalam rancangan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga merumuskan jumlah program dan jumlah kegiatan.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 melalui Tiga program, 2 program di

kepemudaan dan 1 program dikeolahragaan, 7 kegiatan, dan 19 sub kegiatan, sebagai berikut :

B. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini terdiri dari kegiatan :

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
 - 1.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
 - 1.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
 - 1.3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
 - 1.4. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
 - 1.5. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi.
 - 1.6. Pemberian Penghargaan Kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi
 - 1.7. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi
 - 1.8. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

2. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi.
 - 2.1. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi

C. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program ini terdiri dari kegiatan :

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan sebagai berikut
 - 1.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi.
2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi.
 - 2.2. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional, dengan sub kegiatan sebagai berikut
 - 3.1. Seleksi Atlet Daerah
 - 3.2. Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
 - 3.3. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi.
 - 3.4. Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi.

- 3.5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
- 4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 4.1. Pengembangan Organisasi Keolahragaan

D. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini terdiri dari kegiatan :

- 1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C.33 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Peringkat Daerah Tahun 2023
Dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Riau

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA												
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN												
2	19	02	1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi									91.012.172.163		69.625.501.901
2	19	02	1.01	1	Jumlah Pemuda yang dibina	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Yang Berkompetensi aktif berorganisasi dan berwirausaha	685 Orang	685 Orang	152.368.529	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pemuda yang dibina	685 Orang	41.500.000	
2	19	02	1.01	2	Jumlah Pemuda yang dibina	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Yang Berkompetensi aktif berorganisasi dan berwirausaha	685 Orang	685 Orang	1.424.061.202	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pemuda yang dibina	685 Orang	270.000.000	
2	19	02	1.01	3	Jumlah Pemuda yang dibina	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Yang Berkompetensi aktif berorganisasi dan berwirausaha	685 Orang	685 Orang	583.083.995	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pemuda yang dibina	685 Orang	530.000.000	
2	19	02	1.01	4	Jumlah Pemuda yang dibina	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Yang Berkompetensi aktif berorganisasi dan berwirausaha	685 Orang	685 Orang	1.393.377.536	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pemuda yang dibina	685 Orang	1.659.857.346	

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	19 02	1.01 5	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kemudahan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kemudahan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	Jumlah Pemuda Yang Berkompetensi aktif berorganisasi dan berwirausaha		685 Orang	1 Unit	685 Orang	188.299.710		Jumlah Pemuda yang dibina	685 Orang	195.360.349
2	19 02	1.01 6	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	Jumlah Pemuda Yang Berkompetensi aktif berorganisasi dan berwirausaha		685 Orang	1 Dokumen	685 Orang	182.768.348		Jumlah Pemuda yang dibina	685 Orang	129.250.711
2	19 02	1.01 8	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kemudahan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kemudahan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Yang Berkompetensi aktif berorganisasi dan berwirausaha		685 Orang	1 Dokumen	685 Orang	155.333.979		Jumlah Pemuda yang dibina	685 Orang	155.333.979
2	19 02	1.01 9	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Yang Berkompetensi aktif berorganisasi dan berwirausaha		685 Orang	211 Orang	685 Orang	249.154.950		Jumlah Pemuda yang dibina	685 Orang	311.796.323
2	19 02									201.927.315				602.107.719

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Ukur	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
2	19 02	1.02 2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Pemuda yang dibina	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Pemuda Yang siap berperanaktif dalam masyarakat		685 Orang	2 Dokumen	685 Orang	201.927.315	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pemuda yang dibina	685 Orang	602.107.719
2	19 03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								83.283.060.599					62.730.295.474
2	19 03	1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah atlet potensial yang dibina	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termantafkan	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina		364 14 Unit Orang	29 Cabor		7.542.947.046	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah atlet potensial yang dibina	364 Orang	7.825.807.560
2	19 03	1.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi													
2	19 03	1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah atlet potensial yang dibina	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina		364 7 Dokumen Orang	29 Cabor		2.927.492.425	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah atlet potensial yang dibina	364 Orang	1.669.928.187
2	19 03	1.02 1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi													
2	19 03	1.02 3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah atlet potensial yang dibina	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina		364 352 Orang Orang	29 Cabor		5.955.848.831	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah atlet potensial yang dibina	364 Orang	3.369.981.514
2	19 03	1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional								10.093.488.297					10.264.577.213
2	19 03	1.03 1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet potensial yang dibina	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina		364 100 Orang Orang	29 Cabor		188.299.982	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah atlet potensial yang dibina	364 Orang	195.361.231

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	19 03	1.03 2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah atlet potensial yang dibina	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina		364 Orang	29 Cabor	8.353.802.011	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah atlet potensial yang dibina	364 Orang	8.459.652.690
2	19 03	1.03 3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah atlet potensial yang dibina	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina		364 Orang	29 Cabor	890.141.174	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah atlet potensial yang dibina	364 Orang	923.521.468
2	19 03	1.03 4	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah atlet potensial yang dibina	Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina		364 Orang	29 Cabor	564.899.745	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah atlet potensial yang dibina	364 Orang	586.083.487
2	19 03	1.03 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah atlet potensial yang dibina	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina		364 Orang	29 Cabor	96.345.385	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah atlet potensial yang dibina	364 Orang	99.958.337
2	19 03	01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga							56.763.284.000				39.600.000.000
2	19 03	1.04 2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah atlet potensial yang dibina	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina		364 Orang	29 Cabor	56.763.284.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah atlet potensial yang dibina	364 Orang	39.600.000.000
2	19 04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							3.198.736.000				3.000.000.000
2	19 04	1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							3.198.736.000				3.000.000.000

[illegible]



PROVINSI RIAU

4

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2023 Terdiri dari Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dan dokumen RPJMD Provinsi Riau

Jumlah seluruh Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau di Tahun 2023 adalah :

- a. Program Dinas Kebudayaan berjumlah 4 (empat) Program
- b. Kegiatan Dinas Kebudayaan berjumlah 12 (dua belas) Kegiatan
- c. Sub Kegiatan Dinas Kebudayaan berjumlah 32 (Tiga puluh dua) Sub Kegiatan

Kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan/sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 113.900.669.222,- (*Seratus tiga belas miliar sembilan ratus juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*). Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2023 selengkapnya disajikan Tabel 4.1

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI RIAU

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												92.824.305.907
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARAHGA												
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												22.888.497.059
2	19	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												14.612.859.413
2	19	01	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	100 Persen 100 91 Orang/ Persen Bulan	100 Persen	14.612.859.413	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	100 Persen		15.342.506.270		
2	19	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah												1.616.185.995
2	19	01	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	100 Persen 100 1 Paket	100 Persen	32.750.502	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	100 Persen		34.184.650		
2	19	01	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	100 Persen 100 2 Paket	100 Persen	266.729.992	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	100 Persen		432.293.682		

Rencana Tahun 2023																	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja				Target Capaian Kinerja				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Tolok Ukur		Target				
2	19	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga		100 Persen	100 Persen	100 Persen		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	100 Persen	146.520.938				
2	19	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga		100 Persen	100 Persen	100 Persen		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	100 Persen	48.833.134				
2	19	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga		100 Persen	100 Persen	100 Persen		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	100 Persen	537.219.017				
2	19	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						94.047.263					97.574.035				
2	19	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga		100 Persen	100 Unit	100 Persen		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	100 Persen	97.574.035				
2	19	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.203.898.488					6.185.047.208				

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	19 01	1.08 02	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga		100 Persen	21 Laporan	100 Persen	2.742.519.420	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	100 Persen	2.907.571.228	
2	19 01	1.08 4	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga		100 Persen	8 Laporan	100 Persen	3.461.379.068	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	100 Persen	3.277.475.980	
2	19 01		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							361.505.900				374.625.072	
2	19 01	1.09 1	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga		100 Persen	10 Unit	100 Persen	139.210.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	100 Persen	135.981.198	
2	19 01	1.09 2	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga		100 Persen	10 Unit	100 Persen	22.862.500	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	100 Persen	23.726.624	

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	19 01	1.09 6	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga		100 Persen	70 Unit	100 Persen	82.253.400	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	100 Persen	94.267.250
2	19 01	1.09 11	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Kepemudaan dan Olahraga		100 Persen	1 Unit	100 Persen	117.180.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepemudaan dan olahraga	100 Persen	120.650.000
2	19 02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN											
2	19 02	1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi							4.530.375.564				3.895.206.427
2	19 02	1.01 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda yang Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Yang Berkompetensi aktif berorganisasi dan berwirausaha		685 Orang	25 Orang	685 Orang	152.368.529	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pemuda yang dibina	685 Orang	41.500.000
2	19 02	1.01 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Pemuda yang Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Yang Berkompetensi aktif berorganisasi dan berwirausaha		685 Orang	120 Orang	685 Orang	1.424.061.202	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pemuda yang dibina	685 Orang	270.000.000

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	19	02	1.01	3				Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
								685 Orang	282 Orang	685 Orang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pemuda yang dibina	685 Orang	530.000.000
								685 Orang	38 Orang	685 Orang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pemuda yang dibina	685 Orang	1.659.857.346
								685 Orang	1 Unit	685 Orang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pemuda yang dibina	685 Orang	195.360.349
								685 Orang	1 Dokumen	685 Orang	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pemuda yang dibina	685 Orang	129.250.711

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
2	19 03	1.02 1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah atlet potensial yang dibina	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi		364 Orang	7 Dokumen	29 Cabor	2.927.492.425	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah atlet potensial yang dibina	364 Orang	1.669.929.187
2	19 03	1.02 3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah atlet potensial yang dibina	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event		364 Orang	352 Orang	29 Cabor	5.955.848.831	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah atlet potensial yang dibina	364 Orang	3.369.981.514
2	19 03	1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional								10.093.488.297				10.264.577.213
2	19 03	1.03 1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet potensial yang dibina	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		364 Orang	100 Orang	29 Cabor	188.299.982	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah atlet potensial yang dibina	364 Orang	195.361.231
2	19 03	1.03 2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah atlet potensial yang dibina	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		364 Orang	15 Pelatda	29 Cabor	8.353.802.011	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah atlet potensial yang dibina	364 Orang	8.459.652.690
2	19 03	1.03 3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah atlet potensial yang dibina	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		364 Orang	214 Orang	29 Cabor	890.141.174	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah atlet potensial yang dibina	364 Orang	923.521.468

Kode		Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur		Target
2	19 03	1.03 4	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah atlet potensial yang dibina	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina		364 Orang	140 Orang	29 Cabor	564.899.745	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah atlet potensial yang dibina	364 Orang	586.083.487	
2	19 03	1.03 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah atlet potensial yang dibina	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina		364 Orang	1 Dokumen	29 Cabor	96.345.385	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah atlet potensial yang dibina	364 Orang	99.958.337	
2	19 03	01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga											39.600.000.000	
2	19 03	1.04 2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah atlet potensial yang dibina	Jumlah Cabang Olahraga Yang Dibina		364 Orang	4 Dokumen	29 Cabor	56.763.284.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah atlet potensial yang dibina	364 Orang	39.600.000.000	
2	19 04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN											3.000.000.000	
2	19 04	1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan											3.000.000.000	
2	19 04	1.01 2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah pemuda yang dibina menjadi kader pramuka	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Provinsi Yang Dibina	50 Orang	1 Organisasi	1 Organisasi	3.198.736.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah pemuda yang dibina menjadi kader pramuka	50 Orang	3.000.000.000	
										TOTAL		113.900.689.222			92.824.305.907



PROVINSI RIAU

5

Penutup

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2023 mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, disusun guna memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2000 tentang Kepemudaan, dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional, dengan mengacu kepada RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025 serta RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau adalah program tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 diharapkan mampu menjadi pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakan strategis dalam lingkup kerjanya secara lebih sistematis, terarah, dan terukur dengan baik pencapaian kinerjanya.

Pekanbaru, September 2022

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI RIAU



H. BOBY RACHMAT, S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19830516 200112 1 002